



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENUNJANG DIAGNOSTIK**
3. NHK : **249645**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.475.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 254 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 162.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, SUZUKI CARRY FUTURA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000



6. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.675.112

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.688.025.112

III. HUTANG Rp. 80.285.055

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.607.740.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.